

ABSTRAK

MUH. YUSRIL SYARIF. *Akuntabilitas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Proses Legislasi DPRD Kota Makassar (Studi Kasus: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren)* (dibimbing oleh Andi Luhur Prianto dan Irwan Alim).

Akuntabilitas politik merupakan prinsip penting dalam demokrasi yang menuntut keterbukaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap tindakan wakil rakyat. Dalam konteks legislasi daerah, fraksi partai memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan setiap keputusan politik yang diambil. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas politik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam proses legislasi Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi akademis dan bahan refleksi bagi DPRD serta PKB dalam meningkatkan transparansi legislasi. Penelitian menggunakan teori Schedler dan Bovens dengan dua dimensi utama yaitu *answerability* dan *enforceability*, melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi *answerability*, Fraksi PKB telah menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme formal DPRD dan komunikasi konstituen, namun penyebaran informasi kepada publik belum optimal. Pada dimensi *enforceability*, pengawasan lebih dominan bersifat internal partai dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Secara keseluruhan, akuntabilitas Fraksi PKB telah memenuhi prosedur kelembagaan namun masih bersifat normatif, sehingga perlu diperkuat agar menghadirkan keterbukaan dan kontrol publik yang lebih substantif.

Kata Kunci: Akuntabilitas Politik, Fraksi PKB, Proses Legislasi, *Answerability*, *Enforceability*